

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan Penetapan Dokumen Rancangan Renja Kerja (Renja) PD Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.

Penetapan Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan jangka waktu satu tahun PD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Strategis PD. Penetapan Renja PD memuat kebijakan program dan kegiatan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Kami berharap Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di setiap Perangkat Daerah, Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan Pintu Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 serta diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong tercapainya Visi Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 “Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”.

Teluk Dalam, 29 Juli 2024

Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Nias Selatan,



INTANSANI HARIA, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19730919 199303 2 007

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	5
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	7
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.....	7
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	12
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	13
4.1. Program dan kegiatan.....	13
4.2. Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026.....	14
4.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD.....	14
4.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
4.5. Usulan dan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan.....	15
Bab V PENUTUP.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan yang dimaksudkan untuk menjabarkan berbagai program dan rencana strategis khususnya lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan jangka waktu satu tahun PD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Strategis PD. Renja PD memuat kebijakan program dan kegiatan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di setiap Perangkat Daerah, Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, antara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor ... Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.
18. Keputusan Bupati Nias Selatan nomor 100.3.3.2/68/2024 tahun 2024 tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, merupakan pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan PD untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.

3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan PD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja dengan kepemimpinan yang berbasis pada pelayanan, jujur dan sederhana.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Nias Selatan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan, adalah sebagai berikut :

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

- 1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5 Administrasi umum Perangkat Daerah
- 6 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- 7 Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- 8 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

II Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1 Pembuatan peta potensi investasi Kab/Kota

III Program Promosi Penanaman Modal

- 1 Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

IV Program Pelayanan Penanaman Modal

- 1 Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu

dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

V Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- 1 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

VI Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 1 Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab/Kota

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan sampai dengan Tahun 2023 dan Perkiraan capaian tahun berjalan 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.1 (TC. 29) sebagaimana terlampir.

Berdasarkan tabel dimaksud, capaian renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan sampai dengan Tahun 2023 tergolong sangat baik, dimana persentase capaiannya sebesar 98,22 %. Hal menunjukkan bahwa realisasi hampir sempurna dari target yang telah ditentukan. Begitu juga dengan perkiraan capaian tahun 2024, dapat dikategorikan baik dalam hal realisasi capaian. Hal-hal yang menjadi kendala realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah adanya pos anggaran untuk percetakan dan jilid dokumen perda yang tidak bisa direalisasikan mengingat masih dalam pembahasan oleh Biro Hukum Setda Provsu.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2023
KABUPATEN NIAS SELATAN

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9-7+9)	11 = (10/4)
2	18	1								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	100%	100%	100%	100%	39,9%	
2	18	1	2.01							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	7 Dokumen	
2	18	1	2.01	01						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	
2	18	1	2.01	02						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
2	18	1	2.01	03						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	
2	18	1	2.01	04						
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
2	18	1	2.01	05						
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	-	-	-	-	-	
2	18	1	2.01	06						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Lap	-	-	-	-	-	
2	18	1	2.01	07						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	
2	18	1	2.02							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	41,67%	
2	18	1	2.02	01						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	5 Bulan
2	18	1	2.02	02						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	-	-	-	-	-	
2	18	1	2.02	03						
		Pelaksanaan Penelaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penelaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	-	-	-	-	-	
2	18	1	2.02	04						
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	-	-	-	-	-	
2	18	1	2.02	05						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	
2	18	1	2.02	06						
		Pengelolaan dan Penyajian Balan Tanggapan Pemerkasaan	Tersedianya Dokumen Balan Tanggapan Pemerkasaan dan Tidak Lunas Pemerkasaan	Dok	-	-	-	-	-	

2	18	1	2.02	87	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	
2	18	1	2.02	88	Penyusunan Pelaporan dan Analisa progres Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisa Progres Realisasi Anggaran	Dok	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.03	81	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.03	82	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dok	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.03	83	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Lap	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.03	84	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tersedianya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.03	85	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.03	86	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.03	87	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah operator yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	24 Org	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.05	81	Peningkatan Sikap dan Prestasi Kerja Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sikap dan Prestasi Kerja Pegawai	Unit	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.05	82	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keagregasiannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Keagregasiannya	21 Paket	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.05	83	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%
2	18	1	2.06	81	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket
2	18	1	2.06	82	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket
2	18	1	2.06	83	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.06	84	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket
2	18	1	2.06	85	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket
2	18	1	2.06	86	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dok	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.06	87	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Bahan/Material	Paket	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.06	88	Facilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Lap	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.06	89	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan
2	18	1	2.06	90	Penatausahaan Aritip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Aritip Dinamis pada SKPD	Dok	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.06	91	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok	-	-	-	-	-	-

2	18	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Ada /Tdk ada	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2	18	1	2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.07.03	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	9 Unit	9 Unit	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.07.04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.07.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	14 Lap	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	48%	-
2	18	1	2.08.01	Penyediaan Jasa Sural Marjural	Tersedianya Penyediaan Jasa Sural Marjural	1 Lap	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	-
2	18	1	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Lap	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-
2	18	1	2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	1 Lap	-	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	10 Laporan	5 Laporan	-
2	18	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	5 Unit	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	47%	-
2	18	1	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	100%	5 Unit	-	-
2	18	1	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.09.03	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.09.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bin	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	-
2	18	2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM DAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan investasi di Kabupaten Nias Selatan	100%	-	100 %	100 %	100%	100 %	-	-
2	18	2	2.01	Pemilihan Pembiayaan Fasilitas/Investasi Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/investasi bidang penanaman modal	100%	-	-	-	-	-	-	-
2	18	2	2.01.01	Pemilihan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Investasi dan Kemudahan Penanaman Modal	Diterapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Investasi dan Kemudahan Penanaman Modal	12 Dok	-	-	-	-	-	-	-
2	18	2	2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Investasi dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mempertahankan Bersinergi Di Daerah	12 Keg. Usaha	-	-	-	-	-	-	-
2	18	2	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi daerah investasi	2 Dok	-	-	-	-	-	-	-
2	18	2	2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-

2	18	3	2.02	02	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dok	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-	-	-
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	100%	-	100 %	100 %	100%	100%	-	-
2	18	3	2.01		Penyenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang menjadi promosi penanaman modal	2 Dok	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-	-	-
2	18	3	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Data Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dok	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
2	18	3	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (PMA/PMON)	1 Dok	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%	-	100 %	100 %	100%	-	-	-
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin yang diterbitkan secara online	300 izin	-	100 Orang	100 Orang	100%	-	-	-
2	18	4	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	-	100 Orang	100 Orang	100%	-	-	-
2	18	4	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Tersedianya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	-	-	-	-	100 Kegiatan Usaha	-	-
2	18	4	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengacuan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terselenggaranya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2	18	4	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	12 Kag. Usaha	-	-	-	-	-	-	-
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100 %	100 %	100 %	100%	-	-	-
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMA dan PMON yang dipantau, dibina dan diawasi	216 usaha	216 Usaha	100 %	100 %	100%	-	-	-
2	18	5	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	216 Kegiatan usaha	216 Kegiatan Usaha	195 Kegiatan Usaha	195 Kegiatan Usaha	100%	-	-	-
2	18	5	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	216 Pelaku Usaha	216 Pelaku Usaha	215 Pelaku Usaha	216 Pelaku Usaha	100%	-	-	-
2	18	5	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	216 Kegiatan usaha	216 Kegiatan Usaha	128 Kegiatan Usaha	128 Kegiatan Usaha	100%	250 Kegiatan Usaha	-	-
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten	100%	-	-	-	-	-	-	-
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha yang membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100%	-	-	-	-	-	-	-

2	18	8	201	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Didukung dan Dimanfaatkan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12 Dik	-	-	-	-	-	-	-	-
---	----	---	-----	----	--	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---



Tabel 4.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2023
KABUPATEN NIAS SELATAN

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS SELATAN

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (8+7+9)	11 = (10/4)
2 19 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akurat, tepat dan transparan			2.216.399,900	2.174.899,909	98,22%	Rp	408.829,000	
2 19 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	7 Dokumen	33.177,000	33.177,000	100%	Rp	11.945,300	
2 19 1 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersebutnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	6.000,000	6.000,000	100%	Rp	2.270,900	
2 19 1 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersebutnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500,000	7.500,000	100%	Rp	1.533,900	
2 19 1 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersebutnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	6.100,000	6.100,000	100%			
2 19 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan OPA-SKPD	Tersebutnya Dokumen OPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen OPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.077,000	7.077,000	100%	Rp	1.536,000	
2 19 1 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan OPA-SKPD	Tersebutnya Dokumen Perubahan OPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan OPA-SKPD	-	-				Rp	3.500,000	
2 19 1 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersebutnya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	-	-						
2 19 1 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersebutnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	6.500,000	6.500,000	100%	Rp	3.104,500	
2 19 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	100%	89.330,200	85.379,200	96%	Rp	41.000,380	
2 19 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersebutnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	71.880,000	67.920,000	94%	Rp	33.640,000	
2 19 1 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersebutnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-						
2 19 1 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersebutnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-						
2 19 1 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersebutnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-						
2 19 1 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersebutnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.550,200	10.550,200	100%	Rp	3.860,250	
2 19 1 2.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemantauan	Tersebutnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemantauan dan Tidak Lanjut Pemantauan	-	-						

2	18	1	202	87	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6,900,000	6,900,000	100%	Rp	3,500,000		
2	18	1	202	88	Penyusunan Pelaporan dan Analisis progres Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	203	89	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-	-				#DIV/0!	Rp	-	
2	18	1	203	91	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	203	92	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tertelaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	203	93	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	203	94	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertelaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	203	95	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertelaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	203	96	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	203	97	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tertelaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	204	98	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Jumlah aparat yang mendapatkan manfaat administrasi kepengawasan Perangkat Daerah	-	-	45,828,600	45,828,600	100%	Rp	-		
2	18	1	205	99	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	205	100	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Keengkapannya	-	-	45,828,600	45,828,600	100%				
2	18	1	205	101	Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi Kepengawasan	Tertelaksananya Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi Kepengawasan	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	206	102	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	666,783,100	666,977,016	100%	Rp	221,483,460		
2	18	1	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	8,426,400	8,426,400	100%	Rp	1,062,200		
2	18	1	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	19,573,000	19,573,000	100%	Rp	5,156,000		
2	18	1	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket	115,146,500	115,146,500	100%	Rp	53,841,200		
2	18	1	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	26,929,200	26,929,200	100%	Rp	30,229,050		
2	18	1	206	06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundung-undangan	Tersedianya Bahan Baku dan Perawatan Perundung-undangan	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	206	07	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Bahan/Material	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	206	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tertelaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	490,708,000	495,901,916	100%	Rp	131,365,000		
2	18	1	206	10	Penatausahaan Anso Dinamis pada SKPD	Tertelaksananya Penatausahaan Anso Dinamis pada SKPD	-	-				#DIV/0!			
2	18	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tertelaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-				#DIV/0!			

2	18	1	2.87	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	100%	100%	82,513,400	82,513,400	100%	Rp	-	
2	18	1	2.87	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-			#DIV/0!		
2	18	1	2.87	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-			#DIV/0!		
2	18	1	2.87	03	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	9 Unit	9 Unit	52,513,400	52,513,400	100%		
2	18	1	2.87	04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-			#DIV/0!		
2	18	1	2.87	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-			#DIV/0!		
2	18	1	2.87	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-			#DIV/0!		
2	18	1	2.88	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	14 Laporan	14 Laporan	134,460,000	134,460,000	100%	Rp	134,800,000	
2	18	1	2.88	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkaisannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	100%	Rp	4,500,000
2	18	1	2.88	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	2,060,000	2,060,000	100%		
2	18	1	2.88	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-			#DIV/0!		
2	18	1	2.88	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	122,400,000	122,400,000	100%	Rp	120,000,000
2	18	1	2.89	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100 %	100 %	77,330,000	78,619,000	98%	Rp	8,930,000	
2	18	1	2.89	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	58,080,000	54,369,000	97%	Rp	1,500,000
2	18	1	2.89	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-			#DIV/0!		
2	18	1	2.89	03	Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	Terkaisannya Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	-	-			#DIV/0!		
2	18	1	2.89	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terkaisannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-			#DIV/0!		
2	18	1	2.89	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terkaisannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-			#DIV/0!		
2	18	1	2.89	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terkaisannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	21,250,000	21,250,000	100%	Rp	8,330,000
2	18	2		PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	-	-			#DIV/0!	Rp	77,738,000	
2	18	2	2.91	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kemudahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif bidang penanaman modal	-	-			#DIV/0!	Rp	-	
2	18	2	2.91	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-			#DIV/0!	Rp	-
2	18	2	2.91	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terkaisannya Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Menerima Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	-	-			#DIV/0!	Rp	-
2	18	2	2.92	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi daerah investasi	-	-	484,826,500	482,264,593	93%	Rp	77,738,000	
2	18	2	2.92	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	484,826,500	482,264,593	93%	Rp	77,738,000

2	18	2	201	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	-			#DIV/0!			
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	-	-	80.081,100	80.011,100	100%	Rp	-	
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang menjadi promosi penanaman modal	-	-	50.051,100	50.011,100	100%	Rp	-	
2	18	3	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Data Strategi Promosi Penanaman Modal	-	-	21.008,300	20.908,300	100%			
2	18	3	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tertelaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (PMA/PMON)	-	-	29.042,800	29.042,800	100%			
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	-	-	80.000,000	49.570,000	99%	Rp	-	
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tinjau yang diterbitkan secara online	-	-	50.000,000	49.570,000	99%	Rp	-	
2	18	4	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	-	-	50.000,000	49.570,000	99%			
2	18	4	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Kriteria Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Tertelaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Kriteria Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	-	-			#DIV/0!			
2	18	4	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengawasan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Tertelaksanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	-	-			#DIV/0!	Rp	-	
2	18	4	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/insentif Daerah	Tertelaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	-	-			#DIV/0!	Rp	-	
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	100 %	532,100,000	532,100,000	100%	Rp	-	
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMA dan PMDN yang dipantau, dibina dan diawasi	216 Usaha	216 Usaha	532,100,000	532,100,000	100%	Rp	-	
2	18	5	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tertelaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	216 Kegiatan Usaha	216 Kegiatan Usaha	100.896,400	100.896,400	100%			
2	18	5	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tertelaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	216 Pelaku Usaha	216 Pelaku Usaha	278.864,000	278.864,000	100%			
2	18	5	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tertelaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	216 Kegiatan Usaha	216 Kegiatan Usaha	154.339,600	154.339,600	100%			
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten	-	-			#DIV/0!	Rp	-	
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tinjau usaha yang membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	-	-			#DIV/0!	Rp	-	

2	18	8	2,01	81	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perorangan dan Non Perorangan Berbasis Sistem Pelayanan Perorangan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perorangan dan Non Perorangan Berbasis Sistem Pelayanan Perorangan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dapat, Dapat dan Dimanfaatkan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-			#DIV/0!			
---	----	---	------	----	---	--	---	---	--	--	---------	--	--	--



BAB III

TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025, Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ikut berperan dalam pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan baik secara Nasional, Provinsi dan sampai ke Kabupaten/kota. Adapun arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang sesuai dengan Visi, Misi dan Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Program Promosi Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan yang selanjutnya disebut DPMPPTSP Kabupaten Nias Selatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan kabupaten.

Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam negeri.

Kegiatan Promosi Penanaman Modal memiliki beberapa fokus prioritas yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Potensi Investasi

Mengidentifikasi sektor-sektor yang menarik bagi investor berdasarkan potensi, keunggulan komperatif, dan kebijakan pemerintah. Untuk itu hal-hal yang dievaluasi adalah faktor faktor seperti ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komperatif lainnya yang mempengaruhi daya tarik investasi.

2. Perencanaan Strategi Promosi

Merumuskan rencana strategis untuk mempromosikan potensi investasi provinsi: Bidang ini merencanakan strategi promosi yang mencakup tujuan jangka panjang dan pendek, target pasar, serta segmen investor yang ingin mereka jangkau, seperti :

- a. Kampanye Promosi Nasional: Melakukan kampanye promosi yang luas dengan melibatkan berbagai saluran media, seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan media sosial, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi investasi dalam negeri.
- b. Penyediaan Informasi Terpadu: Membangun platform atau portal investasi yang menyediakan informasi terpadu tentang peluang investasi, kebijakan pemerintah, prosedur perizinan, dan insentif bagi investor dalam negeri. Memastikan informasi tersebut mudah diakses dan terkini.
- c. Roadshow dan Seminar Investasi: Mengadakan roadshow dan seminar investasi di berbagai wilayah untuk memperkenalkan potensi investasi lokal kepada calon investor. Membahas manfaat dan peluang investasi dalam negeri serta memberikan contoh kesuksesan investasi yang telah dilakukan.

- d. Kerjasama dengan Asosiasi Bisnis: Membangun kemitraan dengan asosiasi bisnis dan organisasi industri untuk meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi investasi dalam negeri. Mengadakan pertemuan, forum diskusi, dan kegiatan lain yang melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- e. Pendekatan Personal: Melakukan pendekatan personal kepada calon investor potensial melalui pertemuan langsung, kunjungan ke kantor perusahaan, dan pertemuan bisnis untuk menjelaskan keuntungan dan insentif investasi dalam negeri.
- f. Peningkatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta: Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempromosikan investasi dalam negeri. Melibatkan pelaku usaha lokal dalam kegiatan promosi dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Strategi-promosi penanaman modal dalam negeri dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap negara. Penting untuk memiliki strategi yang komprehensif dan berkelanjutan guna menarik investasi dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Pengembangan Materi Promosi

Membuat materi promosi seperti brosur, presentasi, video, dan situs web yang menjelaskan keunggulan investasi di provinsi tersebut: Bidang ini mengembangkan materi promosi yang menarik dan informatif untuk memperkenalkan potensi investasi provinsi kepada calon investor. Materi tersebut mencakup informasi tentang sektor-sektor prioritas, kebijakan pemerintah, insentif investasi, infrastruktur, dan kesempatan bisnis.

4. Partisipasi dalam Acara Promosi

Menghadiri pameran, konferensi, dan seminar di dalam dan luar negeri yang berkaitan dengan investasi: Bidang ini aktif dalam berpartisipasi dalam acara promosi seperti pameran, konferensi, dan seminar yang relevan dengan investasi. Mereka menggunakan

kesempatan ini untuk memperkenalkan potensi investasi provinsi kepada calon investor dan menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan terkait

5. Pelayanan Informasi

Menyediakan informasi yang komprehensif dan akurat tentang potensi investasi, peraturan dan kebijakan investasi, insentif, dan infrastruktur. Bidang promosi penanaman modal memberikan layanan informasi kepada calon investor. Mereka menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang potensi investasi di provinsi tersebut, termasuk peraturan dan kebijakan investasi, insentif yang tersedia, dan infrastruktur yang ada.

6. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Menjalin kerjasama dengan lembaga investasi, konsultan, perwakilan perdagangan, dan organisasi bisnis. Bidang ini menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, seperti lembaga investasi, konsultan, perwakilan perdagangan, dan organisasi bisnis. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas jaringan, mendapatkan informasi terkini tentang peluang investasi, dan mendapatkan dukungan dalam promosi penanaman modal.

7. Evaluasi dan Analisis

Mengevaluasi efektivitas kegiatan promosi yang telah dilakukan dan menganalisis data terkait investasi. Bidang ini melakukan evaluasi terhadap kegiatan promosi yang telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitasnya. Mereka menganalisis data dan informasi terkait respon investor, jumlah investasi yang berhasil didapatkan, dan dampak ekonomi dari investasi tersebut. Evaluasi dan analisis ini membantu dalam mengidentifikasi strategi promosi yang efektif dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan melakukan langkah-langkah ini secara berurutan, bidang promosi penanaman modal dapat memperkenalkan dan mempromosikan potensi investasi provinsi kepada calon investor, meningkatkan minat

investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang signifikan.

2. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan Penanaman Modal meliputi Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, hal ini dapat dilihat dari produk layanan yang telah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.

Adapun beberapa program dan kegiatan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ini adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan, memverifikasi, merencanakan, Mengidentifikasi, mengolah, memeriksa, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan;
- b. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, merrnmpm, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menincklanjuti, menclokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimpfifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- d. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, merrumpm, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola

layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan mempunyai prioritas pembangunan yang harus dicapai yaitu :

1. Mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan bebas KKN.
2. Menciptakan aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan.
3. Menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif.
4. Memberikan kepastian dalam pelayanan publik.
5. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.
6. Meningkatkan kualitas analisis, kajian dan perumusan kebijakan pelayanan administrasi perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan mempunyai Tujuan Rencana Kerja yaitu :

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan berorientasi pada pelayanan.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan.

Sedangkan Sasaran ialah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab.
2. Menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 mencakup 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan, yaitu :

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

- 1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4 Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
- 5 Administrasi umum Perangkat Daerah
- 6 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- 7 Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- 8 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

II Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1 Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota
- 2 Pembuatan peta potensi investasi Kab/Kota

III Program Promosi Penanaman Modal

- 1 Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

IV Program Pelayanan Penanaman Modal

- 1 Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

V Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- 1 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

VI Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 1 Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab/Kota

4.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026.

Rumusan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan untuk sumber dana APBD, APBD Provinsi dan APBN secara detail dapat dilihat pada *Tabel 2.2 (TC. 33)* sebagaimana terlampir. Pada tabel tersebut telah dimuat rencana kerja tahun 2025 yang meliputi target kinerja dan target anggaran, begitu juga dengan Prakiraan maju tahun 2026 yang meliputi target kinerja dan target anggaran. Rencana Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 sebesar 1.000.000.000 dan prakiraan maju 2026 sebesar 1.117.200.000,-.

4.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD

Rumusan Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan secara detail dapat dilihat pada *Tabel 2.3 (TC. 30)* sebagaimana terlampir. Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan target renstra dan realisasi capaian terdiri dari Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Penilaian dari inspektorat) target 2023 B dan realisasi B, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan DPMPTSP target 2023 B dan Realisasi mencapai A, Rasio Daya Serap Tenaga Kerja realisasi capaian 3.5 %, Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha tahun 2023 tercapai 100 % jika dilihat dari targetnya.

4.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rumusan Rancangan Awal RKPD tahun 2025 OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan secara detail dapat dilihat pada *Tabel 2.4 (TC. 31)* sebagaimana terlampir. Tabel ini memuat tentang Indikator Kinerja, Target Capaian, Program kegiatan, dan kebutuhan dana.

4.5 USULAN DAN PROGRAM KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

Rumusan tentang Usulan dan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan secara detail dapat dilihat pada *Tabel 2.4 (TC. 31)* sebagaimana terlampir. Adapun yang menjadi Usulan dan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 meliputi Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota sebagai Upaya strategis untuk bisa menarik minat investor dengan menampilkan potensi Investasi Di Wilayah Kabupaten Nias Selatan Melalui Kegiatan Promosi dan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Jempol Camat) yang merupakan Usulan Masyarakat untuk Memberikan pelayanan dan kemudahan dalam mempercepat penerbitan perizinan para pelaku usaha di Kecamatan.

[illegible]

[illegible]

Tabel TC. 33
Rancangan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS SELATAN																			
KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Catatan Penting			Prestasi Maju Rencana Thn 2026					
								Kondisi awal (2018)	Kondisi akhir (2021)	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Bentuk Dana	Target Capaian Kinerja	Ketepatan Dana / Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
2	18	1		PROGRAM PENGUKUH URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIOSA	Celluler pelayanan administratif, peningkatan, leuagan dan pengendalian barang milik daerah yang akurat dan terapan							DPH-PPTSP	100%	Rp. 780.000.000	DAU		100%	Rp. 812.500.000	
2	18	1	3.81	Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan							DPH-PPTSP	8 Des	Rp. 18.870.000	DAU		8 Des	Rp. 18.870.000	
2	18	1	3.81	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersenyunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							DPH-PPTSP	4 Des	Rp. 4.500.000	DAU		4 Des	Rp. 5.000.000	
2	18	1	3.81	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersenyunya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							DPH-PPTSP	1 Des	Rp. 3.000.000	DAU		1 Des	Rp. 3.000.000	
2	18	1	3.81	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersenyunya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									Rp.	-				
2	18	1	3.81	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersenyunya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							DPH-PPTSP	1 Des	Rp. 2.750.000	DAU		1 Des	Rp. 3.000.000	
2	18	1	3.81	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersenyunya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							DPH-PPTSP	1 Des	Rp. 2.750.000	DAU		1 Des	Rp. 2.750.000	
2	18	1	3.81	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersenyunya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD									Rp.	-				
2	18	1	3.81	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersenyunya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							DPH-PPTSP	1 Laporan	Rp. 8.000.000	DAU		1 Laporan	Rp. 8.000.000	
2	18	1	3.82	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administratif keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan							DPH-PPTSP	100%	Rp. 56.780.000	DAU		10 Des	Rp. 57.380.000	
2	18	1	3.82	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersenyunya Gaji dan Tunjangan ASN							DPH-PPTSP	5 Orang/Bulan	Rp. 44.280.000	DAU		5 Orang/Bulan	Rp. 44.280.000	
2	18	1	3.82	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersenyunya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									Rp.	-				
2	18	1	3.82	Penyediaan Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersenyunya Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD									Rp.	-				
2	18	1	3.82	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersenyunya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									Rp.	-				
2	18	1	3.82	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersenyunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							DPH-PPTSP	1 Laporan	Rp. 8.000.000	DAU		1 Laporan	Rp. 8.500.000	
2	18	1	3.82	Pengelolaan dan Pembiayaan Belanja Anggaran	Tersenyunya Dokumen Belanja Anggaran Pembiayaan dan Tidak Dapat Pembiayaan									Rp.	-				
2	18	1	3.82	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersenyunya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD							DPH-PPTSP	12 Laporan	Rp. 4.500.000	DAU		12 Laporan	Rp. 4.500.000	
2	18	1	3.82	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Tersenyunya Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran									Rp.	-	DAU			
2	18	1	3.83	Administrasi Barang Milik Daerah Pihak Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administratif BMD Perangkat Daerah yang dilaksanakan							DPH-PPTSP	100%	Rp.	-	DAU		100%	Rp.
2	18	1	3.83	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersenyunya Perancah Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									Rp.	-	DAU			
2	18	1	3.83	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Tersenyunya Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD									Rp.	-	DAU			
2	18	1	3.83	Koordinasi dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Tersenyunya Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD									Rp.	-	DAU			
2	18	1	3.83	Pemeliharaan, Pengembangan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Tersenyunya Pemeliharaan, Pengembangan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD									Rp.	-				
2	18	1	3.83	Revisi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Tersenyunya Revisi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD									Rp.	-	DAU			
2	18	1	3.83	Penyusunan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Tersenyunya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD									Rp.	-	DAU			
2	18	1	3.83	Penyusunan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Tersenyunya Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD									Rp.	-				
2	18	1	3.83	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah surat yang mendukung manfaat administratif kepegawaian Perangkat Daerah							DPH-PPTSP	100%	Rp.	-	DAU		34 Org	Rp.

1	18	1	205	81	Perengkapan Sarana dan Prasarana Gedung Pegawai	Terselenggara Unit Perengkapan Sarana dan Prasarana Gedung Pegawai					Rp	-				Rp	-
1	18	1	206	82	Perengkapan Peralatan Dinas Berupa Abjad Komputersisasi	Terselenggara Peralatan Dinas Berupa Abjad Komputersisasi					Rp	-	DAU			Rp	-
1	18	1	207	83	Perengkapan dan Perengkapan Administrasi Kepegawaian	Terselenggara Perengkapan dan Perengkapan Administrasi Kepegawaian					Rp	-				Rp	-
1	18	1	208	84	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggara layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah				DPH-PPPTSP	Ada 176% ada	Rp	480.269.000	DAU	Ada 176% ada	Rp	819.880.000
1	18	1	208	81	Penyediaan Kumpulan Instruksi Lahir/Perengkapan Bangunan Kantor	Terselenggara Kumpulan Instruksi Lahir/Perengkapan Bangunan Kantor				DPH-PPPTSP	1 Paket	Rp	2.250.000	DAU	1 Paket	Rp	2.900.000
1	18	1	208	82	Penyediaan Perengkapan dan Perengkapan Kantor	Terselenggara Perengkapan dan Perengkapan Kantor				DPH-PPPTSP	1 Paket	Rp	8.000.000	DAU	1 Paket	Rp	9.000.000
1	18	1	208	83	Penyediaan Perengkapan Rumah Tangga	Terselenggara Perengkapan Rumah Tangga						Rp	-				
1	18	1	208	84	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggara Bahan Logistik Kantor				DPH-PPPTSP	1 Paket	Rp	75.000.000	DAU	1 Paket	Rp	75.000.000
1	18	1	208	85	Penyediaan Barang Cetak dan Perengkapan	Terselenggara Barang Cetak dan Perengkapan				DPH-PPPTSP	1 Paket	Rp	25.000.000	DAU	1 Paket	Rp	30.000.000
1	18	1	208	86	Penyediaan Bahan Baku dan Perengkapan Perengkapan	Terselenggara Bahan Baku dan Perengkapan Perengkapan						Rp	-	DAU		Rp	-
1	18	1	208	87	Penyediaan Bahan / Material	Terselenggara Bahan/Material						Rp	-				
1	18	1	208	88	Facilities Kumpulan Tantu	Terselenggara Fasilitas Kumpulan Tantu						Rp	-				
1	18	1	208	89	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi				DAU/Luar Daerah	12 Laporan	Rp	380.000.000	DAU	12 Laporan	Rp	420.000.000
1	18	1	208	90	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-				
1	18	1	208	91	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-				
1	18	1	208	92	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-				
1	18	1	208	93	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi				DPH-PPPTSP	Ada 176% ada	Rp	-	DAU	Ada 176% ada	Rp	-
1	18	1	208	94	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-				
1	18	1	208	95	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-				
1	18	1	208	96	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-	DAU		Rp	-
1	18	1	208	97	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-	DAU		Rp	-
1	18	1	208	98	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-	DAU		Rp	-
1	18	1	208	99	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-	DAU		Rp	-
1	18	1	208	100	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-	DAU		Rp	-
1	18	1	208	101	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-	DAU		Rp	-
1	18	1	208	102	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-	DAU		Rp	-
1	18	1	208	103	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-	DAU		Rp	-
1	18	1	208	104	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi				DPH-PPPTSP	12 Laporan	Rp	120.000.000	DAU	12 Laporan	Rp	130.000.000
1	18	1	208	105	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi				DPH-PPPTSP	4 Unit	Rp	80.000.000	DAU	4 Unit	Rp	81.000.000
1	18	1	208	106	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi				DPH-PPPTSP	4 Unit	Rp	50.000.000	DAU	4 Unit	Rp	50.000.000
1	18	1	208	107	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-				
1	18	1	208	108	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-				
1	18	1	208	109	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-	DAU		Rp	-
1	18	1	208	110	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi						Rp	-	DAU		Rp	-
1	18	1	208	111	Perengkapan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Koordinasi				DPH-PPPTSP	1 Unit	Rp	10.000.000	DAU	1 Unit	Rp	11.000.000

1	14	1		PROGRAM PENGEMBANGAN KLINIK PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan					DPH-PPTSP	100%	Rp	85.000,000	DAU		100%	Rp	180.000.000
2	14	2	3.81	Penyediaan Pembiayaan Fasilitas/Investasi Bidang Penanaman Modal yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/Investasi bidang penanaman modal							Rp	-				Rp	-
3	14	3	3.21	01	Terlaksananya Kegiatan Daerah yakni Pemberian Fasilitas/Investasi dan kemudahan Penanaman Modal							Rp	-				Rp	-
4	14	3	3.21	02	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendukung dan Kemitraan Berusaha di Daerah							Rp	-				Rp	-
5	14	3	3.80		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah zona potensi daerah investasi				DPH-PPTSP	Adi IT&S ada	Rp	85.000,000	DAU		Adi IT&S ada	Rp	180.000.000
6	14	3	3.02	01	Pembiayaan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Daerah (Peta, Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota)				DPH-PPTSP	1 Dokumen	Rp	85.000,000					
7	14	3	3.02	02	Pembiayaan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota						Rp	-	DAU		1 Dokumen	Rp	100.000.000
8	14	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan				DPH-PPTSP	100%	Rp	30.000,000	DAU		100%	Rp	30.000.000
9	14	3	3.81		Penyenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang menjadi promosi penanaman modal				DPH-PPTSP	2 Dek	Rp	30.000,000	DAU		2 Dek	Rp	30.000.000
10	14	3	3.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya Data Strategi Promosi Penanaman Modal						Rp	-	DAU			Rp	-
11	14	3	3.01	02	Pembiayaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (PROMODKOT)				DPH-PPTSP	1 Dokumen	Rp	20.000,000	DAU	Utuk mendukung program prioritas nasional	1 Dokumen	Rp	30.000.000
12	14	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perbaikan dan non perbaikan penanaman modal				DPH-PPTSP	100%	Rp	45.000,000	DAU		100%	Rp	100.000.000
13	14	4	3.81		Penyediaan Pelayanan dan Non Pelayanan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah idn yang disediakan secara online				DPH-PPTSP	800 idn	Rp	45.000,000	DAU		300 idn	Rp	100.000.000
14	14	4	3.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Pelayanan dan Non pelayanan berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Teknologi secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Terpadu Pelayanan dan Non Pelayanan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Teknologi secara Elektronik bagi Pelaku usaha						Rp	-	DAU	Utuk mendukung program prioritas nasional	500 Pelaku Usaha	Rp	50.000.000
15	14	4	3.01	02	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan dan Non Pelayanan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Terlaksananya Pemenuhan Pemenuhan Kebutuhan akan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Berbasis dan Non Pelayanan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				DPH-PPTSP	100 Kegiatan Usaha	Rp	45.000,000	DAU			Rp	50.000.000
16	14	4	3.01	03	Pemediaan Layanan Kemitraan dan Pengembangan Pengeluaran Monev/audit terhadap Pelayanan Terpadu Pelayanan dan Non Pelayanan	Terlaksananya Layanan Kemitraan dan Terselenggaranya Pengawasan Monev/audit Terhadap Pelayanan Terpadu Pelayanan dan Non Pelayanan						Rp	-				Rp	-
17	14	4	3.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pendukung pemberian Fasilitas/Investasi Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pendukung Pemberian Fasilitas/Investasi Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha						Rp	-				Rp	-
18	14	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				DPH-PPTSP	100%	Rp	100.000,000	DAK-AP		100%	Rp	120.000.000
19	14	5	3.81		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PRA dan PMON yang diberikan, dikoreksi dan diawasi				DPH-PPTSP	216 usaha	Rp	100.000,000	DAK-AP		216 usaha	Rp	120.000.000
20	14	5	3.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Pemenuhan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Pemenuhan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha						Rp	-	DAK-AP			Rp	-
21	14	5	3.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha						Rp	-	DAK-AP			Rp	-
22	14	5	3.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha						Rp	-	DAK-AP			Rp	-
23	14	5	3.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha						Rp	-	DAK-AP			Rp	-
24	14	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Terlaksananya data dan informasi perbaikan dan non perbaikan Kabupaten				DPH-PPTSP	100%	Rp	-	DAU		100%	Rp	-
25	14	6	3.81		Pengawasan Data dan Informasi Perbaikan dan Non Perbaikan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah idn usaha yang membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LUPM)				DPH-PPTSP	100%	Rp	-	DAU		100%	Rp	-
26	14	6	3.01	01	Pengawasan, Pengujian dan Pemeliharaan Data dan Informasi Perbaikan dan Non Perbaikan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Teknologi secara Elektronik	Terlaksananya Data dan Informasi Perbaikan dan Non Perbaikan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Teknologi secara Elektronik				DPH-PPTSP	1 Dokumen			DAU			Rp	-

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	INDEKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Penilaian dan inspektorat)			B	B	B	B	B		B	B	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan DPMPTSP			B	B	B	B	A		A	A	
3	Rasio Daya Semp Tenaga Kerja			3.3%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%		3.5%	3.5%	
4	Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

Teluk, Dalam, Agustus 2024



Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2025

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif (Rp. 000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPH-PPPTSP	Cetakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akurat dan transparan	100%	Rp. 3.334.056,843	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPH-PPPTSP	Cetakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akurat dan transparan	100%	Rp. 790.098.900	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPH-PPPTSP	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	Rp. 33.075.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPH-PPPTSP	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	Rp. 18.870.800	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPH-PPPTSP	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	Rp. 8.268.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPH-PPPTSP	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	Rp. 4.500.300	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	Rp. 8.268.750	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	Rp. 3.000.300	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	Rp. 8.268.750	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	Rp. 2.780.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Rp. 2.720.300	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD			
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPH-PPPTSP	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp. 8.268.750	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPH-PPPTSP	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp. 9.000.000	
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPH-PPPTSP	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	Rp. 2.377.771,433	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPH-PPPTSP	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	Rp. 98.789.800	
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPH-PPPTSP	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bn	Rp. 2.361.233.933	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPH-PPPTSP	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bn	Rp. 44.280.000	honorarium Tgk.
12	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPH-PPPTSP	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPH-PPPTSP	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
13	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPH-PPPTSP	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPH-PPPTSP	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
14	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPH-PPPTSP	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPH-PPPTSP	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp. 8.268.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp. 8.000.000	
16	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemertanian	DPH-PPPTSP	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemertanian dan Tindak Lanjut Pemertanian			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemertanian	DPH-PPPTSP	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemertanian dan Tindak Lanjut Pemertanian			
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp. 8.268.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp. 4.500.000	
18	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	DPH-PPPTSP	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	DPH-PPPTSP	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran			
19	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	DPH-PPPTSP	Jumlah dokumen administrasi BMD Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	Rp. 6.050.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	DPH-PPPTSP	Jumlah dokumen administrasi BMD Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	Rp. -	
20	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
21	Penganggaran Barang Milik Daerah SKPD	DPH-PPPTSP	Terselenggaranya Penganggaran Barang Milik Daerah SKPD	12 Bn	Rp. 6.050.000	Penganggaran Barang Milik Daerah SKPD	DPH-PPPTSP	Terselenggaranya Penganggaran Barang Milik Daerah SKPD			
22	Koordinasi dan Panduan Barang Milik Daerah SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Laporan Hasil Panduan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Panduan Barang Milik Daerah SKPD			Koordinasi dan Panduan Barang Milik Daerah SKPD	DPH-PPPTSP	Tersedianya Laporan Hasil Panduan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Panduan Barang Milik Daerah SKPD			
23	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	DPH-PPPTSP	Terselenggaranya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD		Rp. -	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	DPH-PPPTSP	Terselenggaranya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD			
24	Reformulasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPH-PPPTSP	Terselenggaranya Reformulasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp. -	Reformulasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPH-PPPTSP	Terselenggaranya Reformulasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			

25	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPH-PTTSP	Terdapatnya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPH-PTTSP	Terdapatnya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
26	Pemerintahan Barang Milik Daerah SKPD	DPH-PTTSP	Terdapatnya Pemerintahan Barang Milik Daerah SKPD		Rp	-	Pemerintahan Barang Milik Daerah SKPD	DPH-PTTSP	Terdapatnya Pemerintahan Barang Milik Daerah SKPD			
27	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPH-PTTSP	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp	21.600,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPH-PTTSP	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp	-
28	Pengalokasian Sarana dan Prasarana Dapin Pegawai	DPH-PTTSP	Terdapatnya Unit Pengalokasian Sarana dan Prasarana Dapin Pegawai		Rp	-	Pengalokasian Sarana dan Prasarana Dapin Pegawai	DPH-PTTSP	Terdapatnya Unit Pengalokasian Sarana dan Prasarana Dapin Pegawai			
29	Pengalokasian Pakaian Dinas Bersebut Akibat Kelangkaan	DPH-PTTSP	Terdapatnya Pakaian Dinas Bersebut Akibat Kelangkaan	1 Paket	Rp	21.600,000	Pengalokasian Pakaian Dinas Bersebut Akibat Kelangkaan	DPH-PTTSP	Terdapatnya Pakaian Dinas Bersebut Akibat Kelangkaan			
30	Pendataan dan Pengalokasian Administrasi Kepegawaian	DPH-PTTSP	Terdapatnya Pendataan dan Pengalokasian Administrasi Kepegawaian		Rp	-	Pendataan dan Pengalokasian Administrasi Kepegawaian	DPH-PTTSP	Terdapatnya Pendataan dan Pengalokasian Administrasi Kepegawaian			
31	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPH-PTTSP	Terdapatnya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	Ada /Tdk ada	Rp	511.830,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPH-PTTSP	Terdapatnya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	Ada /Tdk ada	Rp	490.250,000
32	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPH-PTTSP	Terdapatnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Rp	6.660,000	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPH-PTTSP	Terdapatnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Rp	2.250,000
33	Pemeliharaan Perawatan dan Perlangkapan Kantor	DPH-PTTSP	Terdapatnya Perawatan dan Perlangkapan Kantor	1 Paket	Rp	9.660,000	Pemeliharaan Perawatan dan Perlangkapan Kantor	DPH-PTTSP	Terdapatnya Perawatan dan Perlangkapan Kantor	1 Paket	Rp	8.020,000
34	Pemeliharaan Perawatan Rumah Tangga	DPH-PTTSP	Terdapatnya Perawatan Rumah Tangga		Rp	-	Pemeliharaan Perawatan Rumah Tangga	DPH-PTTSP	Terdapatnya Perawatan Rumah Tangga			
35	Pemeliharaan Bahan Logistik Kantor	DPH-PTTSP	Terdapatnya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Rp	96.800,000	Pemeliharaan Bahan Logistik Kantor	DPH-PTTSP	Terdapatnya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Rp	75.030,000
36	Pemeliharaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPH-PTTSP	Terdapatnya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Rp	18.150,000	Pemeliharaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPH-PTTSP	Terdapatnya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Rp	25.030,000
37	Pemeliharaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	DPH-PTTSP	Terdapatnya Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	Rp	18.150,000	Pemeliharaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	DPH-PTTSP	Terdapatnya Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan			
38	Pemeliharaan Bahan / Material	DPH-PTTSP	Terdapatnya Bahan/Material		Rp	-	Pemeliharaan Bahan / Material	DPH-PTTSP	Terdapatnya Bahan/Material			
39	Facilias Kunjungan Tamu	DPH-PTTSP	Terdapatnya Fasilitas Kunjungan Tamu		Rp	-	Facilias Kunjungan Tamu	DPH-PTTSP	Terdapatnya Fasilitas Kunjungan Tamu			
40	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam/Luar Daerah	Terdapatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp	363.000,000	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam/Luar Daerah	Terdapatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp	380.000,000
41	Penatausahaan Anap Dinamis pada SKPD	DPH-PTTSP	Terdapatnya Penatausahaan Anap Dinamis pada SKPD		Rp	-	Penatausahaan Anap Dinamis pada SKPD	DPH-PTTSP	Terdapatnya Penatausahaan Anap Dinamis pada SKPD			
42	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPH-PTTSP	Terdapatnya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPH-PTTSP	Terdapatnya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
43	Pengalokasian Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	DPH-PTTSP	Jumlah pengalokasian barang milik daerah	Ada /Tdk ada	Rp	24.200,000	Pengalokasian Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	DPH-PTTSP	Jumlah pengalokasian barang milik daerah	Ada /Tdk ada	Rp	-
44	Pengalokasian Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	DPH-PTTSP	Terdapatnya Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan		Rp	-	Pengalokasian Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	DPH-PTTSP	Terdapatnya Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan			
45	Pengalokasian Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	DPH-PTTSP	Terdapatnya Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp	-	Pengalokasian Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	DPH-PTTSP	Terdapatnya Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan			
46	Pengalokasian Mebel	DPH-PTTSP	Terdapatnya Mebel	4 Unit	Rp	14.520,000	Pengalokasian Mebel	DPH-PTTSP	Terdapatnya Mebel			
47	Pengalokasian Perlatan dan Meub Lemari	DPH-PTTSP	Terdapatnya Perlatan dan Meub Lemari		Rp	-	Pengalokasian Perlatan dan Meub Lemari	DPH-PTTSP	Terdapatnya Perlatan dan Meub Lemari			
48	Pengalokasian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPH-PTTSP	Terdapatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp	-	Pengalokasian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPH-PTTSP	Terdapatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
49	Pengalokasian Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPH-PTTSP	Terdapatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	Rp	9.660,000	Pengalokasian Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPH-PTTSP	Terdapatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
50	Pemeliharaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	DPH-PTTSP	Terdapatnya jasa penunjang usaha pemerintahan daerah yang tersedia	Ada /Tdk ada	Rp	289.360,250	Pemeliharaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	DPH-PTTSP	Terdapatnya jasa penunjang usaha pemerintahan daerah yang tersedia	Ada /Tdk ada	Rp	134.300,000
51	Pemeliharaan Jasa Surt Menyurat	DPH-PTTSP	Terdapatnya Pelayanan Jasa Surt Menyurat	1 Laporan	Rp	2.904,000	Pemeliharaan Jasa Surt Menyurat	DPH-PTTSP	Terdapatnya Pelayanan Jasa Surt Menyurat	1 Laporan	Rp	4.020,000
52	Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPH-PTTSP	Terdapatnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	Rp	3.306,250	Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPH-PTTSP	Terdapatnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
53	Pemeliharaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	DPH-PTTSP	Terdapatnya Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	1 Laporan	Rp	-	Pemeliharaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	DPH-PTTSP	Terdapatnya Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor			
54	Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPH-PTTSP	Terdapatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Rp	263.140,000	Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPH-PTTSP	Terdapatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Rp	120.030,000
55	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	DPH-PTTSP	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	4 Unit	Rp	70.180,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	DPH-PTTSP	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	4 Unit	Rp	60.300,000
56	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	DPH-PTTSP	Terdapatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	4 Unit	Rp	60.500,000	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	DPH-PTTSP	Terdapatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	4 Unit	Rp	30.030,000

52	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pagar dan Perancah Kandang Dinas Operasional atau Lapangan	DPH-PPSTP	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pagar dan Perancah Kandang Dinas Operasional atau Lapangan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pagar dan Perancah Kandang Dinas Operasional atau Lapangan	DPH-PPSTP	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pagar dan Perancah Kandang Dinas Operasional atau Lapangan				
53	Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	DPH-PPSTP	Tersedianya Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya			Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	DPH-PPSTP	Tersedianya Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya				
54	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPH-PPSTP	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPH-PPSTP	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
55	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPH-PPSTP	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPH-PPSTP	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
56	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pembiayaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPH-PPSTP	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pembiayaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	Rp	2.680.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pembiayaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPH-PPSTP	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pembiayaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	Rp	10.000.000
57	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPH-PPSTP	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	100%	Rp	80.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPH-PPSTP	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	100%	Rp	80.500.000
58	Peningkatan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Jumlah fasilitas/insentif bidang penanaman modal		Rp	-	Peningkatan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Jumlah fasilitas/insentif bidang penanaman modal		Rp	-
59	Pemetaan Kawasan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPH-PPSTP	Ditengahkannya Kegiatan Daerah dalam Pemetaan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Rp	-	Pemetaan Kawasan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPH-PPSTP	Ditengahkannya Kegiatan Daerah dalam Pemetaan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Rp	-
60	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPH-PPSTP	Tersedianya Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah		Rp	-	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPH-PPSTP	Tersedianya Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah		Rp	-
61	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Jumlah peta potensi daerah investasi	Ada 1 file BKA	Rp	60.500.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Jumlah peta potensi daerah investasi	Ada 1 file BKA	Rp	60.500.000
62	Pemantauan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Tersedianya Pemantauan Daerah (Perkle) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				Pemantauan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Tersedianya Pemantauan Daerah (Perkle) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
63	Pemetaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp	60.600.000	Pemetaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp	60.000.000
64	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPH-PPSTP	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	100%	Rp	156.250.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPH-PPSTP	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	100%	Rp	20.000.000
65	Pengembangan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Jumlah wilayah yang menjadi promosi penanaman modal	2 Dok	Rp	156.250.000	Pengembangan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Jumlah wilayah yang menjadi promosi penanaman modal	2 Dok	Rp	20.000.000
66	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPH-PPSTP	Tersedianya Data Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	Rp	76.125.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPH-PPSTP	Tersedianya Data Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	Rp	20.000.000
67	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Tersedianya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (PMA/PMDN)	1 Dokumen	Rp	76.125.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Tersedianya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (PMA/PMDN)	1 Dokumen	Rp	20.000.000
68	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPH-PPSTP	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%	Rp	156.250.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPH-PPSTP	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%	Rp	45.000.000
69	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Jumlah izin yang diterbitkan secara online	500 izin	Rp	156.250.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Jumlah izin yang diterbitkan secara online	500 izin	Rp	45.000.000
70	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPH-PPSTP	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	Rp	76.125.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPH-PPSTP	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	Rp	76.125.000
71	Pemantauan Pemenuhan Kriteria Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPH-PPSTP	Tersedianya Pemantauan Pemenuhan Kriteria dan Pemenuhan Kriteria Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	Rp	76.125.000	Pemantauan Pemenuhan Kriteria Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPH-PPSTP	Tersedianya Pemantauan Pemenuhan Kriteria dan Pemenuhan Kriteria Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	Rp	45.000.000
72	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPH-PPSTP	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Rp	-	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPH-PPSTP	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Rp	-
73	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPH-PPSTP	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Rp	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPH-PPSTP	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Rp	-
74	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPH-PPSTP	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	Rp	534.214.080	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPH-PPSTP	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	Rp	100.000.000
75	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Jumlah PMA dan PMDN yang dipantau, dilina dan diawasi	216 usaha	Rp	534.214.080	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPH-PPSTP	Jumlah PMA dan PMDN yang dipantau, dilina dan diawasi	216 usaha	Rp	100.000.000
76	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPH-PPSTP	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 Kegiatan Usaha	Rp	81.144.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPH-PPSTP	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 Kegiatan Usaha	Rp	81.144.000
77	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPH-PPSTP	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 Pelaku Usaha	Rp	302.374.080	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPH-PPSTP	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 Pelaku Usaha	Rp	302.374.080

83	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	250 Kegiatan Usaha	Rp 150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	250 Kegiatan Usaha	Rp 150.000.000
84	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPH-PPTSP	Tersedianya data dan informasi pertanian dan non pertanian Kabupaten	100%	Rp 18.150.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPH-PPTSP	Tersedianya data dan informasi pertanian dan non pertanian Kabupaten	100%	Rp -
85	Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian dan Non Pertanian yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPH-PPTSP	Jumlah tln usaha yang membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100%	Rp 18.150.000	Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian dan Non Pertanian yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPH-PPTSP	Jumlah tln usaha yang membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100%	Rp -
86	Pengelolaan, Penyajian dan Pemertan Data dan Informasi Pertanian dan Non Pertanian Berbasis Sistem Pelayanan Pertanian Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPH-PPTSP	Tersedianya Data dan Informasi Pertanian dan Non Pertanian Berbasis Sistem Pelayanan Pertanian Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dapat Dilaji dan Dimanfaatkan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	Rp 18.150.000	Pengelolaan, Penyajian dan Pemertan Data dan Informasi Pertanian dan Non Pertanian Berbasis Sistem Pelayanan Pertanian Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPH-PPTSP	Tersedianya Data dan Informasi Pertanian dan Non Pertanian Berbasis Sistem Pelayanan Pertanian Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dapat Dilaji dan Dimanfaatkan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Rp 1.000.000.000
					Rp 4.259.420.782					Rp 1.000.000.000



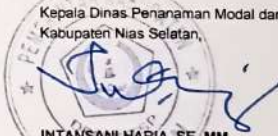
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Selatan

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Nias Selatan	<i>Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan</i>	150,000,000	Upaya strategis untuk bisa menarik minat investor dengan menampilkan potensi Investasi Di Wilayah Kabupaten Nias Selatan Melalui Kegiatan Promosi
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		<i>Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (PMA/PMDN)</i>		
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Nias Selatan	<i>Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal</i>	150,000,000	Usulan Masyarakat untuk Memberikan pelayanan dan kemudahan dalam mempercepat penerbitan perizinan para pelaku usaha di Kecamatan
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Jempol Camat)		<i>Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha</i>		

Teluk Dalam, Agustus 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Nias Selatan,


INTANSANI HARIA, SE.,MM
PEMBINA TK 1
NIP. 19730919-199303 2 007

BAB V

PENUTUP

Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Nias Selatan. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam kinerja terhadap Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tidak terlepas dari keterlibatan seluruh komponen masyarakat Nias Selatan oleh karena itu melalui kerja keras, kebersamaan, dan kesungguhan dapat mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang berbasis pada pelayanan, jujur dan sederhana.

Telukdalam, 29 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Selatan,



INTANSANI HARIA, S.E., MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19730919 199303 2 007